

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

A. Gambaran Umum Kota Batu

1. Sejarah berdirinya Kota Batu

Kota Batu adalah bagian dari dataran tinggi dari kota malang yang terbentuk melalui endapan lava menjadi sebuah danau. Sementara, daerah Kota Batu hingga Kota Malang merupakan cekungan yang terbentuk oleh apitan gunung dan pegunungan. Sejak abad ke 10, Kota Batu dan sekitarnya telah dikenal sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga para kerajaan. Pasalnya, wilayah Kota Batu berada didaerah pegunungan yang memiliki hawa dan udara yang sejuk dan segar.

Pada saat pemerintahan Raja Sindok, seorang petinggi Kerajaan bernama Mpu Supo diperintah oleh Raja Sindok untuk membangun sebuah tempat peristirahatan keluarga kerajaan dipegunungan yang idekatnya terdapat sebuah mata air. Dengan kerja keras, akhirnya Mpu Supo menemukan suatu kawasan yang yang sekarang dikenal sebagai kawasan wisata songgoriti. Kemudian, atas persetujuan Raja Sindok, Mpu Supo yang dikabarkan sakti mandraguna mulai membangun kawasan songgoriti sebagai tempat peristirahatan keluarga kerajaan dan membangun sebuah candi yang diberi nama Candi Supo.³⁰

Kota batu memiliki pemandangan yang indah dan berudara sejuk dan subur, hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat lain untuk

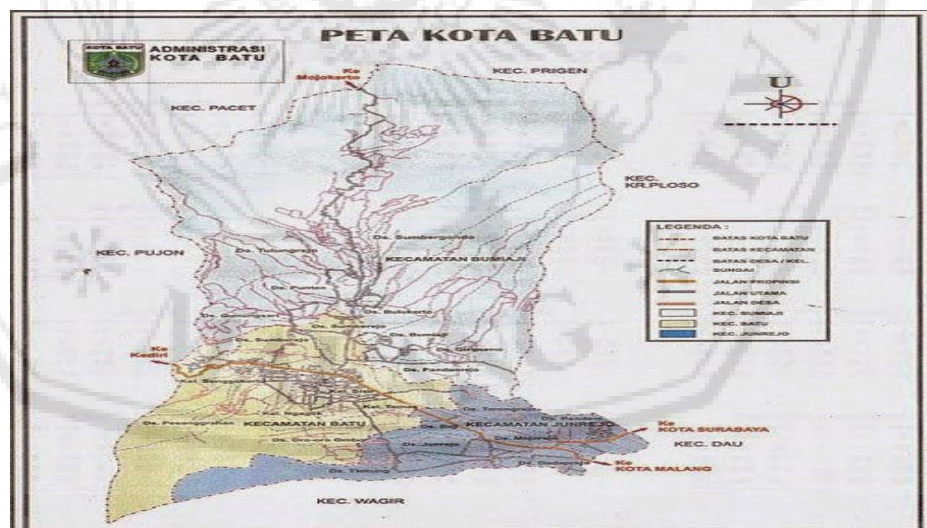
³⁰ Batukota.go.id diakses pada tanggal 8 agustus pukul 15.50

datang ke Kota Batu. Oleh karena itu, pada abad ke 19 Kota Batu berkembang menjadi sebuah Kota Pariwisata khususnya orang-orang Belanda, sehingga orang-orang Belanda itu membangun tempat peristirahatan (villa) dan bahkan hingga bermukim di Batu. Sebuah situd bangunan peninggalan zaman Belanda atau pada masa pemerintahan Hindia Belanda saat ini masih ada dan menjadi sebuah aset kunjungan wisata di kota Batu.³¹

2. Kondisi Geografis Kota Batu

Di sebelah utara Kota Batu ada Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan, sebelah timur Kota Batu ada Kabupaten Malang, sebelah barat ada Kabupaten Malang dan sebelah selatan ada Kabupaten litar dan Kabupaten Malang. Berikut ini adalah Peta Kota Batu :

Gambar 3.1 : Peta Kota Batu



Gambar 2 : Peta Kota Batu

Kota Batu terletak pada ketinggian rata-rata 871 m di atas permukaan laut.

Kota Batu dikelilingi beberapa gunung, di antaranya adalah: Gunung

³¹ Batukota.go.id diakses pada tanggal 8 agustus pukul 16.10

Anjasmoro (2277 m), Gunung Arjuno (3339 m), Gunung Banyak, Gunung Kawi (2651 m), Gunung Panderman (2040 m). Gunung welirang (2156 m).³²

Kota Batu terletak di kaki gunung Panderman yang letaknya 700-1100 m di atas permukaan laut. Daerah dengan suhu dingin, ketika musim dingin suhunya 15°-19° C, ketika musim panas suhunya 28° C. Dan ketika pagi dan sore hari kota ini seringkali diselimuti kabut. Kota Batu terbagi habis menjadi 3 kecamatan, 24 desa/kelurahan, 231 RW dan 1.092 RT. Dilihat komposisi jumlah desa/kelurahan, Kecamatan Bumiaji memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak yaitu masing-masing 9 desa/kelurahan. Banyaknya jumlah desa/kelurahan yang dimiliki tidak otomatis menjadi daerah dengan jumlah RW dan RT terbanyak pula. Terbukti jumlah RW dan RT terbanyak di Kecamatan Batu yaitu masing-masing 91 RW dan 427 RT. Berikutnya Kecamatan Bumiaji 81 RW dan 426 RT dan sisanya berada di Kecamatan Junrejo. Sekretariat Pusat Paguyuban Darma Bakti yang diteliti dalam skripsi ini ada di Kelurahan Songgokerto, Dusun Tambuh, Kecamatan Batu.³³

3. Demografi

Pada tanggal 6 Maret 1993, kota administrasi di Kota Batu dibentuk dan diresmikan, karena Kota Batu dahulunya adalah bagian dari wilayah kabupaten Kota Malang. Tanggal 10 April 1995, dikirim permohonan surat persetujuan DPRD kabupaten Malang dan Bupati Malang tentang peningkatan status kotif

³² Batukota.go.id diakses pada tanggal 8 agustus pukul 16.20

³³ Ibid

Batu menjadi Kotamadya Batu. Pada tanggal 11 April 1995, pengiriman surat persetujuan kepada pembantu Gubernur di Malang tentang peningkatan status kotif Batu menjadi Kotamadya Batu.

Pada tanggal 6 Juni 1996, dengan persetujuan DPR kota Malang, surat persetujuan Bupati dan Pembantu Gubernur di Malang, dikirimkan ke Gubernur Jawa Timur. Dan melalui proses yang sangat panjang tanggal 28 Pebruari 2001 diturunkan surat keputusan MENDAGRI dan Otonomi Daerah. Dan tanggal 21 Juni 2001 Kota Batu disahkan menjadi kota admistratif berdasarkan UU No. 11 tahun 2001. Dan tanggal 17 Oktober 2001 Kota Batu telah diresmikan menjadi daerah otonom yang berpisah dengan wilayah Kabupaten Malang, yang terdiri dari tiga kecamatan dan 19 desa serta kelurahan 5.

Berdasarkan data statistik Kota Batu, pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Batu mencapai 211.298 jiwa. Dengan luas wilayah sekitar 19.908 km, maka kepadatan penduduk adalah sebesar 1.060 jiwa per km. Kepadatan penduduk Kota Batu selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena Kota Batu merupakan daerah otonomi baru yang merupakan kota tujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Pertumbuhan penduduk Kota Batu pada tahun 2014 adalah sebesar 1,17 persen. Tingkat pertumbuhan penduduk ini tercatat mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun sebelum yang sebesar 1,14 persen. Selama periode 2012-2014 pertumbuhan penduduk di Kota Batu relatif stail. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk antara lain jumlah kelahiran,

kematian, dan mutasi penduduk yang terdiri dari penduduk datang dan penduduk pindah. Pertumbuhan penduduk Kota Batu dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1 : Indikator Kependudukan Tahun 2012-2014

Uraian	2012	2013	2014
Jumlah Penduduk	194.793	196.951	211.298
Pertumbuhan Penduduk	1,14	1,17	1,17
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)	978	989	1.060
Sex Ratio (%)	100,76	100,80	101,79

Sumber : Hasil SP 2010 dan Hasil Proyeksi Penduduk 2011-2014 BPS Provinsi Jawa Timur³⁴

Di antara ke3 kecamatan yang ada di Kota Batu, Kecamatan Batu yang paling padat penduduknya. Pada tahun 2014 kepadatan penduduk di kecamatan batu mencapai 2.012 jiwa per km. Hal ini tidak mengherankan jika kecamatan Batu merupakan Kecamatan terpadat di Kota Batu. Ini dikarenakan Kecamatan Batu merupakan Pusat kegiatan pemerintahan maupun ekonomi.

Secara umum jumlah penduduk laki-laki banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh sex ratio yang nilainya lebih dari 100. Pada tahun 2014, untuk setiap 100 penduduk perempuan di Kota Batu terdapat 101 penduduk laki.

³⁴ Badan Pusat Statistik Kota Batu diakses pada tanggal 9 Agustus 2017 pukul 17.20

4. Keadaan Ekonomi

Perekonomian di kota Batu banyak yang ditunjang dari sektor pariwisata dan pertanian. Karena, letak Kota Batu yang berada diwilayah pegunungan membuat banyak pariwisata yang ingin datang dan berkunjung. Maka dari itu, dengan adanya pembangunan pariwisata yang pesat membuat sebagian besar pertumbuhan PDB Kota Batu yang ditunjang dari sektor pariwisata. Pada bidang pertanian, Kota Batu merupakan salah satu daerah penghasil apel terbesar diIndonesia yang membuatnya dijuluki sebagai Kota Apel. Apel Batu memiliki empat variasi yaitu apel manalagi, apel rome, apel anna, dan apel wangi.

Kota Batu juga dikenal sebagai kawasan agropolitan, sehingga juga mendapat julukan sebagai kota agropolitan. Karena letak geografis yang berada didataran tinggi, Kota Batu banyak menghasilkan berbagai sayur mayur, bawang putih, hingga berbagai jenis bunga. Selain itu, Kota Batu juga merupakan Kota seniman, karena terdapat banyak sanggar lukis dan galeri seni yang berada diKota Batu.³⁵

5. Keadaan Pendidikan

Penduduk Kota Batu yang tamat SLTA atau sederajat sebesar 25,03% sedangkan yang menamatkan sekolah sampai jenjang perguruan tinggi mencapai 8,28%. Selain itu, penduduk Kota Batu yang tidak pernah sekolah/tidak tamat SD sebesar 14,86%. Rata-rata tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk di Kota Batu adalah tamat SD/sederajat. Ini bisa terlihat dari besarnya persentase penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah dasar.

³⁵ Wikipedia diakses pada tanggal 09 Agustus 2017

**Tabel 3.2 : Persentase Penduduk Menurut Pendidikan yang
Ditamatkan**

Tingkat Pendidikan	Jumlah (%)
Tidak Pernah Sekolah	3,87
Tidak Tamat SD	10,99
Tamat SD	29,96
Tamat SMP	21,87
Tamat SMA	25,03
Tamat PT	8,23
Angka Partisipasi Sekolah	Jumlah (%)
7-12 Tahun (SD)	114,16
13-15 Tahun (SMP)	88,53
16-18 (SMA)	87,21

Sumber data: BPS Kota Batu 2016 diakses tanggal 7 Agustus pukul 17.20³⁶

Secara umum, angka partisipasi sekolah menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka persentas penduduk yang berpartisipasi dan memanfaatkan fasilitas jenjang pendidikan tersebut akan semakin rendah. Bila diperhatikan angka partisipasi sekolah (APS) pada beberapa jenjang pendidikan nilainya lebih dari 100 persen. Ini menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan tersebut masih terdapat murid yang usianya berada di luar batasan usia sekolah (baik yang lebih tua atau lebih muda) yang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut.

³⁶ Badan Pusat Statistik Kota Batu diakses pada tanggal 7 Agustus pukul 17.20 pukul 17.40

6. Visi dan Misi Kota Batu

Visi Kota Batu adalah sentra pertanian organik berbasis kepariwisataan internasional. Misi Kota Batu adalah Meningkatkan kualitas hidup antar umat beragama, Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik, Mengembangkan sebuah sektor pertanian organik dan perdagangan dalam hasil pertanian organik, Meningkatkan posisi peran dari kota sentra pariwisata menjadi kota kepariwisataan yang berbasis internasional, Optimalisasi pemerintah daerah, Meningkatkan kualitas pendidikan lembaga pendidikan, Meningkatkan Kualitas Kesehatan, dan Mengembangkan Infrastruktur (sektor fisik) khususnya dibidang perkantoran pemerintah fasilitas publik sarana dan prasarana lalu lintas, Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Menciptakan stabilitas dan kehidupan politik di Kota Batu yang harmonis dan demokratis, Memperdayakan masyarakat melalui koperasi dan UKM.³⁷

B. Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu

1. Lokasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu

Alamat Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu Jl.Diponegoro no.8, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65313 Telepon:(0341) 592284.

2. Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu

³⁷ Batukota.go.id diakses pada tanggal 9 agustur pukul 18.00

Visi adalah terwujudnya Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Industri, dan Perdagangan menjadi sebuah lembaga yang tumbuh dan berkembang secara sehat, tangguh, serta mandiri dengan tingkat daya saing yang tinggi, sehingga dapat berperan sebagai pelaku utama dalam perekonomian Kota Batu yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dan sebagai acuan penggerak perekonomian masyarakat.

Sedangkan, Misi adalah Memperdayakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan menjadi pelaku perekonomian yang tangguh dan profesional. Tangguh dan profesional yang dimaksud adalah Meningkatkan kelembagaan, Meningkatkan lapangan pekerjaan. Meningkatkan lapangan usaha di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, mendorong kelompok-kelompok usaha sejenis yang tumbuh berkembang dimasyarakat yang gunanya untuk bergabung dalam sebuah wadah lembaga koperasi, Meningkatkan jiwa kewirausahaan yang sehat, tangguh, mandiri, serta memiliki daya saing yang tinggi dilingkungan koperasi, usaha kecil, menengah, perindustrian, dan perdagangan, Meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan serta menciptakan peluang ekspor.

3. Tupoksi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu

Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kopersai, Usaha Mikro, dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan dan

mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang koperasi, usaha kecil, mikro, dan usaha menengah, perindustrian dan perdagangan. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja di bidang koperasi, usaha kecil, mikro, dan usaha menengah, perindustrian dan perdagangan, perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang koperasi, usaha kecil, mikro, dan usaha menengah, perindustrian dan perdagangan, perencanaan dan pengendalian anggaran, pengendalian urusan administrasi Dinas, pembinaan kelembagaan koperasi dan pengembangan usaha koperasi, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pembiayaan koperasi, pembinaan pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pembiayaan usaha kecil, mikro, dan menengah, pembinaan peningkatan kerja sama industri, pembinaan pengembangan sarana prasarana perdagangan, pengembangan kerja sama pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama bidang koperasi, usaha kecil, mikro, dan usaha menengah, perindustrian dan perdagangan di antara SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait, pemberdayaan dan peningkatan kinerja UPTD, penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- b. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas, urusan ketatalaksanaan dan ketatausahaan Dinas dan menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi: perumusan rencana kerja Sekretariat, pembinaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas, pengendalian urusan ketatalaksanaan dan ketatausahaan Dinas, pembinaan dan pengembangan pegawai, pengendalian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas, pengendalian data informasi hasil kegiatan Dinas dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah, pengendalian Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola ketatalaksanaan dan ketatausahaan, meliputi administrasi umum dan kepegawaian, urusan rumah tangga, barang milik daerah, perpustakaan dan kearsipan. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian, pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan, pengelolaan kearsipan dan Perpustakaan, pengelolaan kehumasan dan keprotokoloan, pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah, pengelolaan administrasi

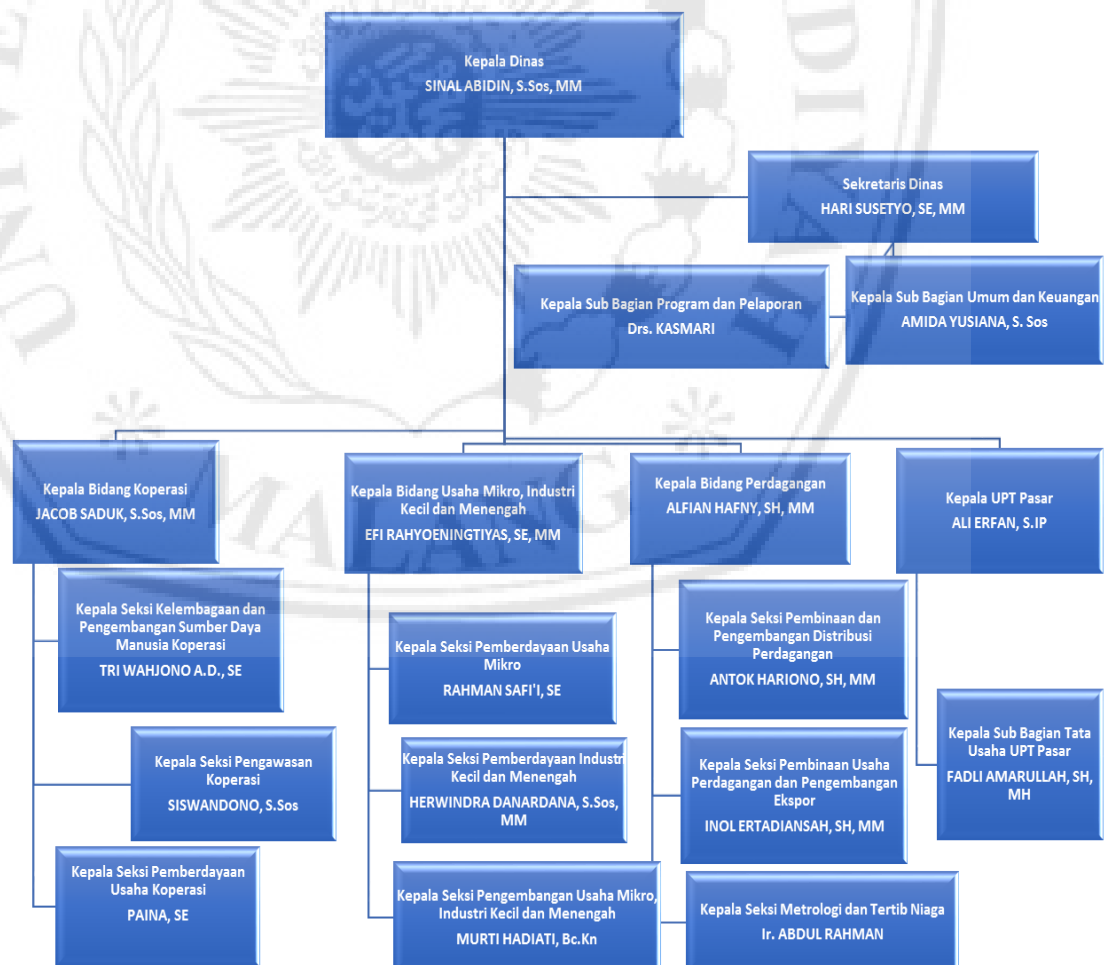
kepegawaia, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- d. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola anggaran dan administrasi keuangan Dinas. Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian, pelaksanaan verifikasi SPP, penyiapan Surat Perintah Membayar, pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan, pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas, penyusunan laporan keuangan Dinas, penyusunan administrasi dan teknis pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana strategis dan rencana kerja Dinas, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan. Sub Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: penyusunan rencana program kegiatan Sub Bagian, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas, penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM), penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), pengelolaan data informasi hasil kegiatan dinas dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan

Gambar 3.2 : Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan



C. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu

1. Lokasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu

Alamat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Kota Batu : Jln. Trunojoyo No.47 Batu, Telp.(0341) 593283 Fax.(0341) 594444

2. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu

Visi adalah terwujudnya Jawa Timur yang kondusif melalui penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan terhadap masyarakat. Sedangkan Misi adalah Meningkatkan penyelenggaraan tibatranmas melalui pengembangan kesalehan dan harmonis sosial di Jawa Timur, Meningkatkan kerjasama antar lembaga dan instansi yang terkait dalam kerangka implementasi tiga pilar yang ada di dalam Good Governance melalui kerjasama Satpol PP atau Pemerintah, Swasta atau Industri, dan masyarakat dalam penegakkan suatu peraturan daerah dan peraturan sebuah pelaksanaannya, Melaksanakan pengendalian deteksi dini serta pemberdayaan masyarakat di wilayah rawan dan anggota satlinmas dalam tanggap darurat bencana dan pam swakarsa, Meningkatkan sarana dan prasarana operasional untuk tibatrans dan linmas, Pencitraan Satpol PP dalam peningkatan pelayanan publik.

3. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu

Tugas adalah memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, Perlindungan kepada masyarakat serta menegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya. Sedangkan, fungsi adalah Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan

pelaksanaanya, Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman serta ketertiban umum di daerah maupun kota, Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat, Melaksanakan koordinasi kepada kepolisian negara, Penyidikan pegawai negari sipil dan atau aparatur lainnya dalam hal memelihara, Menyenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, Menegakkan peraturan daerah serta peraturan pelaksanaannya, Melakukan pengawasan terhadap masyarakat agar lebih mematuhi dan mentaati peraturan daerah beserta peraturan pelaksanaannya.

4. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batu

3.3 : Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

